

PERAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP PEMAHAMAN RADIKAL DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS FT UNM)

St Tri Dian Hardianti

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor berkembangnya radikalisme di kalangan mahasiswa serta bagaimana peran institusi pendidikan tinggi terhadap pemahaman radikal di kalangan mahasiswa dengan membenturkan 3 variabel konsep peran oleh Levinson yaitu perilaku individu, hak dan kewajiban, dan rangkaian aturan-aturan.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya peran institusi pendidikan tinggi terhadap perkembangan radikal di kalangan mahasiswa ini dapat dilihat dari Indikator yang saling berhubungan antara peran kampus UNM dan kepuasan mahasiswa terhadap radikalisme yaitu perilaku individu dengan need, perilaku individu dengan narasi, hak dan kewajiban dengan need, hak dan kewajiban dengan network, rangkaian aturan-aturan dengan need serta rangkaian aturan-aturan dengan narasi. Pentingnya peran kampus dalam mencegah radikal agar menjaga iklim dan budaya kampus untuk tetap menjadi ruang dialektis dan kritis.

Kata Kunci :Peran, Pendidikan, Radikalisme Mahasiswa, Demonstrasi

1. Latar Belakang

Universitas sebagai wajah utama perguruan tinggi dapat dibedakan dari lembaga - lembaga pendidikan lainnya dilihat dari orientasi saintifik yang dijalankannya. Universitas mengeksplorasi dan mengembangkan sains dan teknologi, termasuk konsep, metode dan nilai. Kurikulum yang digunakan berkembang dengan merujuk kepada prinsip-prinsip akademik yang sudah otonom dan mapan.

Dalam peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang tujuan perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kesenian, dengan tujuan tersebut, perguruan tinggi merupakan wadah bagi para siswa yang ingin melanjutkan studinya ketingkat yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mengembangkan diri. Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dituangkan bahwa

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dalam upaya pengembangan diri tersebut, setiap orang sepatutnya terhimpun dalam wadah atau kelompok yang

selanjutnya diharapkan dapat mengkanalisasi minat dan bakat orang tersebut. Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” merupakan jaminan oleh konstitusi kepada warga negara untuk mengoperasikan hak-haknya. Terhadap seluruh hak asasi manusia yang telah dituliskan, konstitusi hanya memberikan satu syarat utama. Syarat utama tersebut tertuang pada 2 ayat dalam Pasal 28J, yaitu:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, tiap orang yang menggunakan hak-hak konstitusionalnya harus memastikan dua pokok pikiran, yaitu bebas dari dan bebas untuk. Dua pokok pikiran tersebut saling berkaitan dan mempunyai hubungan paralel. Dalam logika imajiner, digambarkan bahwa Si A *bebas untuk* mengeluarkan pendapat tentang pendidikan. Sementara Si B harus bebas dari gangguan terhadap pendapat yang diutarakan Si A. Maka, apabila antarwarga

negara paham batasan dalam penggunaan hak konstitusionalnya maka sinergi dan kolaborasi ide akan tercipta dengan optimal. Maka adalah pilihan yang bijak jikalau pemangku kebijakan memaksimalkan investasinya pada bidang pemberdayaan manusia, lebih tepatnya pada bidang pendidikan.

Pendidikan bersifat integratif dan komprehensif, artinya memiliki aspek atau materi yang beraneka ragam dan saling berkaitan antara materi satu dengan lainnya. Pendidikan tidak hanya mengarahkan kualitas pikiran saja, tetapi juga menyangkut etika dan kecerdasan mekanik atau otot. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan pendidikan tidak cukup dilihat dari keberhasilan melahirkan keterampilan kognitif atau afektif atau psikomotorik saja, melainkan ketiga ranah tersebut harus tercapai secara utuh dan sempurna.

Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan perkembangan kemanusiaan. Artinya, pendidikan harus selalu memerhatikan dua hal sekaligus, yaitu perkembangan atau kemampuan yang dimiliki setiap manusia dan memerhatikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.

Seiring dengan dinamika kehidupan yang ditandai dengan semakin canggihnya peralatan, semakin kompleksnya problem kehidupan, dan semakin tingginya tuntutan masyarakat, maka sudah seharusnya diikuti dengan kecerdasan dalam melakukan proses pendidikan agar pendidikan tidak tertinggal dengan dinamika kehidupan sosial.

Universitas Negeri Makassar merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi (formal) yang termasuk bagian penting integral dari masyarakat, bangsa, dan negara dimana tempat kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung. Namun demikian tujuan pendidikan nasional secara umum dan tujuan pendidikan di Universitas Negeri Makassar, menghadapi tantangan berat dengan berkembangnya paham radikal di kalangan mahasiswa.

Upaya untuk menghadirkan proses pendidikan bermutu kerap terhambat sebab hari-hari ini terdapat ancaman nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Ancaman tersebut ialah adanya peningkatan aktivitas radikalisme. Ini dirasakan telah terjadi adanya degradasi nilai-nilai dan cita-cita luhur Pancasila, yang mulai pudar dari jati diri bangsa ini, seperti meningkatnya kekerasan.

Radikalisme dulunya cenderung diarahkan kepada masyarakat bawah dan saat ini mulai bergeser ke kelompok pelajar, bahkan mahasiswa di perguruan tinggi. Kampus yang selama ini dikenal sebagai tempat persemaian manusia berpandangan kritis, terbuka, dan intelektual, ternyata tidak bisa aman dari adanya pengaruh radikalisme. Ideologis radikalisme menyeruak dan telah menginfiltrasi kalangan mahasiswa di berbagai kampus, dimana dari masa hampir selalu ada kelompok radikal baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.

(BNPT, 2016) Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada

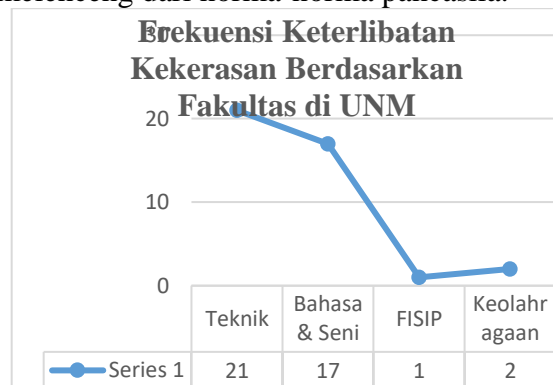
secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Menurut (BNPT, 2016), dalam perspektif filosofis, akar kekerasan muncul dalam fenomena identifikasi diri manusia ke dalam; “aku dan kamu” dan jauh lebih lagi kedalam “kita dan mereka”. Identifikasi inilah yang selanjutnya menjadi akar lahirnya permusuhan yang berujung kekerasan.

Pada prinsipnya, cita-cita pendidikan Indonesia menghendaki pembentukan karakter warga negara khususnya peserta didik yang memiliki kepribadian mulia. Indonesia sebagai suatu organisasi kekuasaan diberikan tugas oleh konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang pada alinea keempat UUD NR 1945 perlu dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan nasional. Visi sistem pendidikan nasional yang tertuang pada Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah suatu sistem yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Gejala radikalisme merupakan tantangan tersendiri bagi suatu institusi pendidikan tinggi. Tantangan ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi praktisi pendidikan tinggi di mana perannya sebagai

aktor pembimbing peserta didik harus memastikan pelaksanaan tujuan konstitusional sistem pendidikan yaitu keluhuran akhlak. Baik institusi maupun praktisi pendidikan tinggi sebagai subjek dituntut menjadi teladan, penyemangat, sekaligus pendorong sebagaimana pepatah ulung tentang pendidikan. *Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*.

Berdasarkan fenomena selama kurun waktu 10 tahun terakhir dalam penelitian (Marijan & Fitrianto, 2013), intensitas kekerasan yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Makassar khususnya Fakultas Teknik menunjukkan angka yang mencengangkan (Lihat Grafik 1). Baik kekerasan antar kelompok mahasiswa maupun kekerasan mahasiswa dengan aktor-aktor lain seperti masyarakat, aparat kepolisian, dan lain-lain. Tingginya intensitas kekerasan yang dilakukan tentu tidak hanya meresahkan masyarakat sekitar tetapi sudah melenceng dari norma-norma pancasila.



Sumber: Diolah dari Database Polda Sulawesi Selatan

Gambaran kekerasan mahasiswa pada sumber data didudukkan sebagai fenomena

tawuran pada umumnya. Dalam arti hanya dianggap fomena objektif agar peneliti tidak terjebak pada *prejudice* kepada mahasiswa. Langkah ini dilakukan karena hanya semata ditujukan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana fenomena paham radikal menjadikan kampus sebagai sasaran empuk melalui *sterotyping* kekerasan atau tawuran. Serta bagaimana peran kampus sebagai institusi pendidikan dalam menghadapi persoalan ini.

Rendahnya etika juga harus menjadi keprihatinan berbagai kalangan karena dilakukan oleh individu sebagai output pendidikan serta dilakukan di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi seseorang agar menjadi orang yang terdidik. Institusi pendidikan menurut Miller, memiliki fungsi utama untuk menumbuhkan daya kreatif, kecerdasan personal, kecerdasan sosial, serta kesadaran kemanusiaan. Sehingga Tujuan pendidikan di Indonesia menghendaki agar manusia yang dihasilkan dari institusi pendidikan adalah manusia yang beriman dan bertakwa di samping terampil dan berbudi pekerti. Namun, persoalannya, tujuan ini lebih merupakan sebuah retorika daripada menjadi doktrin yang harus dimiliki manusia terdidik di Indonesia.

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi, diharapkan mampu mencetak generasi yang berkarakter baik, namun beberapa data yang ada tidak menunjukkan hal tersebut. Salah satunya yang terjadi pada Universitas Negeri Makassar, dimana beberapa data menunjukkan bahwa sejak tahun 1995, aksi tawuran mahasiswa UNM terjadi dan terus

berulang-ulang. Selain itu, aksi demonstrasi yang disertai dengan kerusakan fisik dan perilaku kekerasan pun seringkali terjadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasseh J dengan judul penelitian Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2012) menunjukkan bahwa Demonstrasi yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap nasib bangsa yang serba tidak menentu. Respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi ditanggapi dan diprotes melalui media demonstrasi. Akibatnya Dengan cara 'kekerasan', mahasiswa menilai efektif dibandingkan cara-cara lain. Demikian pula, media akan meliput aksi-aksi demonstrasi yang demikian sehingga 'gaung' demonstrasi terdengar ke mana-mana.

Kemudian ditambahkan dengan referensi penelitian terdahulu yang secara khusus membahas keterkaitan demonstrasi dan radikalisme oleh Milla Hanifah dengan judul penelitian Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar) pada tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam (Hanifah, 2020) menunjukkan bahwa Terminologi radikalisme telah diterima keefektifan sebagai ekspresi fisik yang bertujuan untuk menciptakan kekerasan dan kerusakan. Radikalisme dipahami sebagai gaya informal untuk menegosiasikan ketika

politik formal tidak berhasil menciptakan resolusi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan konsep yang berbeda, dengan judul **“Peran Institusi Pendidikan Tinggi Terhadap Pemahaman Radikal di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus FT UNM)”**.

Peran Institusi Pendidikan Tinggi Terhadap Pemahaman Radikal di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus FT UNM)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa Faktor-Faktor yang Menunjang Berkembangnya Pemahaman Radikal di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus FT UNM)?
- b. Bagaimana Peran Institusi Pendidikan Tinggi Terhadap Pemahaman Radikal di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus FT UNM)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penunjang Berkembangnya Pemahaman Radikal di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus FT UNM)
- b. Untuk Mengetahui Peran Institusi Pendidikan Tinggi Terhadap Pemahaman

Radikal di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus FT UNM)

4. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Peran

Konsep Peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori social (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.

Menurut Konsep ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah ‘tertulis’ seorang Presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2017)

Levinson (2009) dalam (Soekanto, 2017) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan tingkat komitmen independensi seseorang (Ahmad dan Taylor, 2009).

b. Peran Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran strategis pendidikan tinggi ini tetap memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta

pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi juga berperan dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Oleh karena itu diperlukan lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Tuntutan pendidikan masa kini dan masa depan adalah peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan profesional serta sikap, kepribadian dan moral masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan demikian dapat memposisikan masyarakat Indonesia secara bermartabat di masyarakat dunia di era persaingan pasar bebas saat ini. Hal yang sangat mengkhawatirkan dari dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi pada dewasa ini adalah masih rendahnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

c. Konsep Radikalisme

Menurut penulis radikal merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik melalui gerakan sosial dari suatu kelompok sedangkan (Qodir, 2014) menyatakan bahwa Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya.

(BNPT, 2016) mengemukakan bahwa ciri-ciri radikalisme terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan. Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya dan menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, antara lain sebagai berikut:

- a. intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain),
- b. fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah),
- c. eksklusif (membedakan diri dari kelompok lain pada umumnya) dan revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

d. Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1990). Mereka melihat proses sosial melalui tindakan dan interaksinya di mana individu secara intens menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami secara subjektif. Mereka menyatakan bahwa realitas terbentuk secara sosial dan sebagai disiplin sosiologi harus menganalisis bagaimana realitas sosial di konstruksi. Mereka mengakui realitas objektif. Dengan membatasi realitas sebagai kualitas yang

berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan.

Sesuai dengan Durkheim yang melihat struktur sosial yang obyektif ini. Memiliki karakteristik sendiri akan tetapi asal mulanya harus dilihat dalam hubungannya dengan eksternalisasi atau interaksi manusia dalam struktur yang sudah ada. Eksternalisasi kemudian memperluas institusionalisasi aturan sosial, sehingga struktur merupakan satu proses yang kontinyu, bukan sebagai suatu penyelesaian yang sudah tuntas. Sebaliknya, realitas objektif yang terkonstruksi melalui internalisasi kembali mengkonstruksi manusia dalam masyarakat. Proses dialektika ini merupakan proses yang berjalan terus dimana internalisasi dan eksternalisasi individu ke dalam dunia sosial objektif. Ketiga elemen ini: Internalisasi, eksternalisasi, dan obyektifikasi bergerak secara dialektis, (Berger dan Luckman Dalam Poloma, 1994).

5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu eksplanasi.

6. Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dan informan serta data-data lain yang dapat mendukung penelitian ini. Penyajian data ini

terkait Peran Institusi Pendidikan Tinggi Terhadap Pemahaman Radikal di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus: Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar). Penyajian data dan hasil wawancara yang diperoleh terkait dengan Demonstrasi dan Gerakan Sosial Mahasiswa yang disajikan berdasarkan 2 konsep, yaitu konsep *Peran* yang mencakup 3 (tiga) hal yang dicetuskan oleh Levinson (2009) dan konsep *Kebutuhan* dengan 3 (tiga) indikator menurut Webber dan Kruglanski (2016).

Wawancara dilakukan di beberapa tempat yaitu pada Sekretariat MAPERWA FT UNM, Dekanat FT UNM serta di luar lingkungan Kampus Universitas Negeri Makassar. Adapun informan dalam proses wawancara yang dilakukan adalah Para pejabat-pejabat kampus yakni WR III Periode 2016-2020, Dekan FT UNM, serta Ketua-ketua lembaga himpunan mahasiswa dalam lingkup FT UNM. Terpilihnya orang-orang pada bidang tersebut dikarenakan rumusan masalah pada penelitian ini sesuai dengan tupoksi bidangnya sehingga informan yang terpilih dapat memberikan jawaban.

Dengan banyaknya informasi yang diperoleh di lapangan, peneliti melakukan proses eksplanasi atau memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, peneliti mengkategorikan jawaban-jawaban yang dianggap sama yang berkaitan dengan pembahasan. Untuk penyajian data dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks narasi. Selanjutnya penarikan kesimpulan dilakukan setelah data

bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi yang sama.

1). Faktor-faktor yang menumbang berkembangnya radikalisme

a. Kebutuhan (*Needs*)

Salah satu dorongan motivasi yang mendasari radikal adalah "pencarian akan makna," yaitu, suatu kebutuhan universal untuk menjadi "seseorang" yang dihormati oleh orang lain. Pencarian makna kerap kali menjadi tujuan yang penting ketika "pemaknaan tentang kediriannya" hilang karena seseorang pernah mengalami situasi personal berupa kegagalan, penolakan, dan penghinaan. Oleh karena penolakan dan penghinaan yang menghilangkan pemaknaannya, seseorang mulai mengasingkan diri dari lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hasil wawancara melihat dari indikator kebutuhan (*needs*) sebagai faktor radikalisme menurut teori Webber dan Kruglanski, peneliti menilai bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa termasuk dalam faktor pendukung berkembangnya radikal. Hal ini bisa digolongkan terjadi karena adanya sebab akibat, kebutuhan dasar mahasiswa yang menjadi faktor penunjang, indikator seperti tidak adanya keterlibatan pengambilan keputusan, tidak ada pemenuhan hak dan ketidak-sensitifnya birokrasi menanggapi hal tersebut membuat motif ini menjadi landasan utama mahasiswa untuk melakukan beberapa cara agar dapat menarik perhatian untuk segera terpenuhi haknya dalam hal ini melakukan aksi demonstrasi yang berakhir ricuh.

b.Narasi

Narasi merupakan respon umum ketika mengalami kehilangan pemaknaan yang menyakitkan (seperti frustrasi dan penghinaan) adalah keinginan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas penderitaan seseorang. Ini menunjukkan bahwa narasi ideologis memainkan dua peran penting. *Peran pertama* ialah narasi ideologis menyebarkan sistem kepercayaan yang menandakan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai pemaknaan tertentu, secara khusus menggunakan kekerasan terhadap musuh yang berbeda agama, etnis, maupun kelompok sosial lain. Sementara *peran kedua* narasi ideologis adalah memberikan justifikasi moral bahwa kekerasan dapat diterima dan bahkan diinginkan oleh anggota kelompok.

Dari narasi demonstrasi yang berakhir ricuh sudah sering terjadi dan melihat dari intensitas kekerasan di Fakultas Teknik yang cukup tinggi, merupakan hal yang tidak bisa terhindar terhadap pelabelan radikalisme dalam menggambarkan gerakan mahasiswa. narasi-narasi yang terbangun dengan pelabelan radikal terhadap gerakan kemahasiswaan menganggap tidak menjadi masalah untuk tetap bersuara dan menyampaikan pendapat, hal ini karena ruang-ruang belajar seperti kampus seharusnya tidak begitu takut dengan berbagai paham yang berkembang. Persoalan pemahaman radikal adalah masalah maka seharusnya kampus memberikan peran penanganan dan pencegahan bukan justru melabeli bahkan memberi intervensi kepada

mahasiswa yang dianggap terindikasi pemahaman radikal.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ditemukan bahwa yang menjadi penyebab demonstrasi mahasiswa yang berujung pada perilaku kekerasan karena kebanyakan oleh faktor - faktor internal mahasiswa. Faktor internal mahasiswa merupakan faktor dari mahasiswa itu sendiri yang menyebabkan demonstrasi berujung pada perilaku kekerasan, antara lain yaitu: kekerasan sengaja dilakukan sebagai alat agar aspirasi dapat tercapai, mahasiswa tidak memahami substansi demonstrasi, serta faktor deindividuasi yaitu dilepaskannya tanggungjawab pribadi kepada suatu kelompok.

c. Jejaring (Network)

Ketika orang-orang menganut narasi ideologis bahwa secara moral dibenarkan penggunaan kekerasan guna mengembalikan suatu pemaknaan, mereka umumnya termotivasi untuk mencari kehadiran orang lain untuk berbagi keyakinan yang sama. Keyakinan orang cenderung dipengaruhi oleh tipe kelompok yang mereka ikuti karena motivasi universal untuk mencapai saling pengertian dan perasaan bersama tentang kenyataan. Motivasi mendalam dan terhubung ini dipenuhi dengan menciptakan lingkungan yang terkontrol dalam sekelompok individu yang berpikiran sama. Lebih jauh lagi, bergabung dengan sekelompok individu yang berpikiran sama ini secara sosial dimaafkan karena mereka yang mempertahankan keberadaan kelompok sehingga digelar sebagai pahlawan dan martir.

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan diatas dan melihat dari indikator jejaring (*network*) teori Webber dan Kruglanski maka dapat disimpulkan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa termasuk dalam jejaring tetapi tidak termasuk sebagai faktor radikal karena aksi yang dilakukan membangun komunikasi dan *network* dengan menciptakan lingkungan yang terkontrol dalam sekelompok individu yang berpikiran sama tapi tidak memaksa seseorang untuk terlibat dan menyepakati alternative gerakan yang mengarah ke kekerasan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda

2) Peran Institusi Pendidikan Tinggi

a. Perilaku Individu

Perilaku individu berkaitan dengan bentuk interaksi antara karakteristik individu dalam sebuah kelompok atau organisasi, Perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Dilihat dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku berbeda satu sama lain. .

Berdasarkan hasil wawancara, meski ada upaya yang dilakukan, upaya tersebut masih dianggap belum maksimal. Pihak kampus menyatakan bahwa dalam menangani radikalisme adanya peran yang dilakukan yaitu melalui pendekatan seperti

pendekatan keagamaan untuk menunjang perbaikan moral kepada mahasiswa, serta membekali pemahaman-pemahaman dan pendidikan yang benar. Namun hal berbeda yang didapatkan oleh mahasiswa dalam menilai kehadiran kampus menangani isu radikalisme. Pihak lembaga kemahasiswaan menilai kampus tidak hadir dan hanya melakukan pembiaran saja, pernyataan tersebut didasarkan dengan melihat tingginya intensitas gerakan mahasiswa berkonflik menjadikan penyebab langgengnya kekerasan dan tindakan radikal mewarnai gerakan kemahasiswaan di FT UNM

b. Hak dan Kewajiban

Dalam konsep peran, hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang saling terkait, sehingga pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak diinginkan. Hak dan kewajiban juga berkaitan dengan suatu perjanjian yang membahas tentang kebutuhan dan tanggung jawab antar pihak yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan, pentingnya melibatkan semua elemen merupakan hak dan kewajiban setiap organ intim organisasi, termasuk dalam institusi pendidikan tinggi seperti UNM.

Sebagai *agent of change* pelibatan mahasiswa dalam segala proses pengambilan keputusan dalam lingkup kampus UNM berperan besar membawa perubahan terhadap efektifnya keputusan atau kebijakan tersebut berjalan.

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kampus tidak secara serius menjalankan perannya mengatasi radikalisme dikalangan mahasiswa. Ini terlihat mulai dari perbedaan narasi yang disampaikan antara pimpinan kampus terkait radikalisme, tidak ada perlindungan hukum bagi mahasiswa yang terkena aturan kode etik serta tidak tersedianya wadah atau lembaga khusus yang menangani radikalisme dalam lingkup kampus Universitas Negeri Makassar

c. Rangkaian Aturan-aturan

Rangkaian peraturan-peraturan; meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang serta yang membimbing dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif, perguruan tinggi seperti UNM harus siap dari berbagai ancaman termasuk radikalisme. Salah satu langkah yang dapat mencegah terjadinya radikalisme dikampus ialah adanya upaya berbagai pihak dalam memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk pemberian rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum pada setiap subjek kejahatan sebagai bagian dari perlindungan mahasiswa, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian *restitusi*, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Berdasarkan uraian wawancara diketahui bahwa tidak adanya peran kampus UNM dalam menangani ancaman radikalisme dikalangan mahasiswa, hal ini

bisa dinilai dari tidak adanya aturan khusus yang dikeluarkan oleh pihak kampus terkait radikalisme yang bisa membantu mahasiswa untuk membatasi gerakan yang dianggap radikalisme sehingga tidak langsung diberi pelabelan. Juga tidak adanya bantuan hukum atau proses konseling yang diperadakan oleh pihak kampus UNM dalam menangani tindakan-tindakan radikalisme dikalangan mahasiswa.

7. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yaitu factor-faktor apa saja yang membangun radikalisme dikalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dan bagaimana peran institusi pendidikan tinggi terhadap radikalisme dikalangan mahasiswa, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab berkembangnya radikal di Kalangan Mahasiswa FT UNM sesuai dengan indicator pedekatan 3N yaitu *need, narasi dan network* .
2. Peran Universitas Negeri Makassar terhadap pemahaman radikal dikalangan mahasiswa Fakultas Teknik masih kurang baik. Adapun Indikator yang digunakan dengan menggunakan konsep peran oleh Levinso yaitu Perilaku individu, Hak dan kewajiban, serta Rangkaian aturan-aturan.
3. Mahasiswa tidak puas dengan peran institusi pendidikan tinggi terhadap pemahaman radikal dikalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Indikator yang saling berhubungan antara peran kampus UNM dan kepuasan mahasiswa terhadap

radikalisme yaitu perilaku individu dengan need, perilaku individu dengan narasi, hak dan kewajiban dengan need, hak dan kewajiban dengan network, rangkaian aturan-aturan dengan need serta rangkaian aturan-aturan dengan narasi.

b. Saran

Guna memperkecil, mengurangi dan menghindari terjadinya penyebaran pemahaman radikal dikalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, maka akhir dalam penelitian ini, penulis memaparkan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat serta dapat ditindaklanjuti.:

1. Perguruan Tinggi hendaknya meningkatkan fasilitas yang lebih mendukung bagi semua pihak sebagai bentuk motivasi untuk lebih mengembangkan pengetahuan tentang multikultural mahasiswa dalam rangka menanamkan sikap toleransi
2. Perguruan Tinggi hendaknya meningkatkan beberapa kebijakan yang biasa dilakukan sebagai upaya pencegahan masuknya beberapa paham dan ideologi yang menyimpang ke dunia kampus diantaranya radikalisme maupun vandalism.
3. melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan guna untuk membangun hubungan emosional antar pihak mahasiswa dan birokrasi kampus
4. Perlu bekerja lebih cepat dan profesional dalam merespon baik tuntutan dan kebutuhan mahasiswa.
5. perbaikan sistem terutama dalam

persoalan implementasi penegakan aturan akademik yang berkaitan dengan mensupport pelaksanaan fungsi Penasehat Akademik sehingga setiap mahasiswa yang ada di jurusannya dapat terpantau dan terkontrol.

6. Mahasiswa perlu memanfaatkan potensi intelektualnya secara jernih sebagai insan akademis sehingga tidak mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

7. Dan untuk fungsionaris lembaga kemahasiswaan kiranya dapat berfikir jernih demi nama baik almamater UNM sehingga pencitraan kampus akan terjaga dan akan semakin baik di masa-masa yang akan datang.

8. Daftar Pustaka Buku :

Ahmad, Zaini dan Taylor, Dennis. *Commitment to Independence by Internal Auditors: The Effects Of Role Ambiguity And Role Conflict*. Managerial Auditing Journal. Vol. 24 Iss 9.

Aliakov, M. 2012. *Berkembangnya Radikalisme di Perguruan Tinggi*. Tugas Akhir Kuliah Pendidikan Pancasila.

BNPT. (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme*. 1–6.

Cambridge University. 2008. *Cambridge Advanced Learners Dictionary*.

Singapore: Cambridge University Press.

Marijan, K., & Fitrianto, H. (2013). *Anatomi Kekerasan Mahasiswa Di Makassar* (Vol. 03). Universitas Airlangga Surabaya.

Mawardi, I. (2017). *Transformasi Lembaga Pendidikan Tinggi: Penguatan Kualitas Lulusan Sdm Di Era Globalisasi*

(Nomor April). Universitas Muhammadiyah
Magelang
Muchith, M. Saekan . *Radikalisme dalam
Dunia Pendidikan*. Jurnal ADDIN. Vol.
10. No. 1
Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu
Pengantar* (48 ed.). PT Raja Grafindo
Persada.
Sunarto, A. (2017). Dampak Media Sosial
Terhadap Paham Radikalisme. In
Nuansa (Vol. 10, Nomor 2). IAIN
Bengkulu.
Zamroni, D. (2000). *Paradigma Pendidikan
Masa Depan* (1 ed.). Bigraf Publising

Sumber Hukum :

Undang-Undang Dasar 1945, 4 1.
Peraturan Menteri Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Statuta
Universitas Negeri Makassar
Keputusan Rektor Universitas Negeri
Makassar Nomor: 073A/H36/HK/2010
Tentang Peraturan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Makassar

Skripsi :

Hanifah, M. (2020). *Radikalisme Di
Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri
Makassar)*. Universitas Negeri
Makassar.
Larasati, Anggi Dwi. 2018. Peranan
Lembaga Kemahasiswaan dalam
Menangkal Radikalisme di
Universitas Lampung.
Haseh J (2012). *Anarkisme Demonstrasi
Mahasiswa: Studi Kasus Pada
Universitas Islam Negeri Alauddin*

Makassar

Prawista, Kusumandita Gilar. 2011.
Gerakan Mahasiswa Makassar
(Studi kasus mengenai
karakteristik gerakan mahasiswa
dan perilaku kekerasan unjuk rasa
di Makassar
Mulyadi. 2017. Peran Pemuda dalam
Mencegah Paham Radikalisme.